



Pendampingan Manajemen Destinasi Wisata Berbasis Community-Based Tourism di Desa Wisata Sumber Nyamplung, Pandaan, Pasuruan

Siti Muyasaroh^{1*}, Zainul Ahwan², Achmad Komarudin³, Wahidatun Nikmah⁴,
M. Angga Maulana⁵, Choirul Ummah⁶

^{1,2,6} Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Yudharta Pasuruan

³ Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Yudharta Pasuruan

^{4,5} Program Studi Administrasi Bisnis, Universitas Yudharta Pasuruan

Abstrak

Pengembangan desa wisata berbasis masyarakat merupakan strategi penting untuk mendorong kemandirian ekonomi lokal berkelanjutan. Dusun Tembong, Desa Plintahan, Kabupaten Pasuruan memiliki potensi wisata alam Sumber Nyamplung, namun pengelolaannya terkendala keterbatasan SDM, kelembagaan yang belum optimal, dan minimnya promosi. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola wisata melalui pendekatan *capacity building* berbasis *Community-Based Tourism* (CBT). Metode yang digunakan adalah *Asset-Based Community Development* (ABCD) melalui tahapan identifikasi aset, perencanaan partisipatif, implementasi, dan evaluasi. Hasil pengabdian menunjukkan keberhasilan utilisasi aset fisik berupa kawasan mata air Sumber Nyamplung dan aset manusia melalui penguatan kapasitas Pokdarwis serta pemuda setempat. Pemanfaatan aset tersebut terbukti memicu peningkatan partisipasi masyarakat melalui gotong royong, yang berkontribusi pada pembentukan modal sosial dan rasa memiliki. Pelatihan dan pendampingan berhasil meningkatkan kapasitas pengelolaan wisata serta memperkuat peran kelembagaan lokal. Selain itu, pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi menunjukkan adaptasi teknologi digital yang meningkatkan visibilitas destinasi. Secara keseluruhan, integrasi *capacity building* dan CBT efektif mendorong pengembangan desa wisata berkelanjutan, berdampak pada aspek sosial-kelembagaan, serta membuka peluang penguatan ekonomi lokal. Model ini dapat menjadi alternatif pendekatan di wilayah dengan karakteristik serupa.

Keywords:

Capacity Building; Community-Based Tourism; Desa Wisata; Pemberdayaan Masyarakat

Correspondence Author:

Siti Muyasaroh
muyasaroh@yudharta.ac.id

Article History

Submitted; 1 May 2026

Revised; 28 May 2026

Published; 1 June 2025

Facilitating Community-Based Tourism (CBT) for Destination Management in Sumber Nyamplung Tourism Village, Pandaan, Pasuruan

Abstract

Community-based village tourism development is a crucial strategy for promoting sustainable local economic independence. Tembong Hamlet, Plintahan Village, Pasuruan Regency, boasts natural tourism potential in Sumber Nyamplung, but management faces obstacles like limited human resource capacity, suboptimal institutional arrangements, and a lack of promotional strategies. This community service activity aims to increase the community's capacity to manage tourism through a community-based tourism (CBT)-based capacity-building approach. The method used is Asset-Based Community Development (ABCD), including asset identification, participatory planning, program implementation, and evaluation. The results indicate increased community participation through collective activities like cooperation (gotong royong), contributing to social capital formation and a sense of ownership. Training and mentoring successfully increased community capacity in tourism management and strengthened the role of local institutions through the Tourism Awareness Group (Pokdarwis). Furthermore, using social media as a promotional tool demonstrates adaptation to digital technology, thereby increasing destination visibility. Overall, integrating capacity building and CBT proves effective in promoting sustainable village tourism development. This program impacts social and institutional aspects while opening opportunities for strengthening the local economy. Therefore, this model serves as an alternative approach for developing community-based tourism villages in similar regions.

Published by

Yayasan Lentera Avanya
Nagari in collaboration
with Universitas
Tribhuwana Tunggaladewi



This article is licensed
under Creative Commons
Attribution-ShareAlike
(CC BY-SA)

PENDAHULUAN

Pengembangan desa wisata berbasis komunitas (*Community-Based Tourism/CBT*) kini menjadi strategi krusial untuk mendorong kemandirian ekonomi lokal sekaligus menjaga otentisitas destinasi melalui keterlibatan aktif masyarakat sebagai subjek pembangunan (Rochman, 2017; Lane et al., 2022). Dalam mewujudkan model pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan ini, aspek penguatan kapasitas (*capacity building*) masyarakat baik dari segi tata kelola teknis, kelembagaan, maupun adaptasi teknologi digital mutlak diperlukan sebagai fondasi utama (Scheyvens, 1999; Goodwin & Santilli, n.d.; Aref, 2011; Moscardo, 2008). Kesenjangan mendasar antara konsep ideal ini dengan realitas di lapangan terlihat jelas di Desa Plintahan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Di satu sisi, beberapa wilayah telah menunjukkan geliat pariwisata yang progresif melalui destinasi yang sudah mapan seperti Coban Binangun dan Pasar Budaya Pring Sewu. Namun di sisi lain, Wisata Sumber Nyamplung yang berada di Dusun Tembong memiliki tantangan yang jauh lebih kompleks. Potensi mata air alami di wilayah ini telah sekian lama mati suri, sehingga kondisi sarana dan prasarana fisik di area tersebut mengalami penurunan fungsi, banyak yang rusak, serta tidak terawat. Keterbatasan kapasitas SDM dan ketiadaan tata kelola lembaga membuat aset alam bernilai tinggi ini terabaikan. Berangkat dari kondisi objektif tersebut, kegiatan pengabdian ini hadir dengan pendekatan ABCD untuk mengoptimalkan sisa aset yang dapat digunakan. Melalui penguatan kapasitas berbasis CBT, kegiatan ini diarahkan untuk menggerakkan partisipasi swadaya masyarakat guna membenahi tata kelola lingkungan dan kelembagaan, sebagai upaya fundamental dalam mengaktivasi kembali operasionalisasi kawasan Wisata Sumber Nyamplung.

Dari sisi sosial, masyarakat Dusun Tembong menunjukkan karakteristik yang kondusif bagi pengembangan desa wisata, antara lain kuatnya nilai gotong royong, keterlibatan aktif kelompok pemuda, serta adanya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai embrio kelembagaan pengelola wisata (Riannada & Mardiyah, 2021). Selain itu, inisiatif masyarakat dalam mendukung pengembangan wisata melalui skema investasi kolektif mencerminkan adanya potensi kemandirian ekonomi berbasis komunitas. Kondisi ini menjadi modal sosial yang penting dalam mendukung implementasi pendekatan CBT, di mana keberhasilan pengelolaan wisata sangat ditentukan oleh kekuatan partisipasi dan kohesi sosial masyarakat (Jones, 2005). Meskipun demikian, pengembangan Wisata Sumber Nyamplung masih memerlukan penguatan pada beberapa aspek agar potensi yang ada dapat dioptimalkan secara lebih maksimal.

Masyarakat setempat sebenarnya telah memiliki investasi dan komitmen kolektif yang kuat sebagai aset awal pengembangan wisata. Namun, potensi finansial dan modal sosial warga tersebut saat ini masih terjebak dalam tata kelola manajemen yang lemah dan tidak terstruktur. Jumlah pengurus yang aktif tidak lebih dari 10 orang. Sarana dan prasarana fisik banyak yang tidak berfungsi, lantaran lamanya tidak beroperasi, tidak terdapat denah penunjuk arah sebagai penanda. Kondisi riil menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan wisata masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan, khususnya dalam hal manajemen destinasi, pelayanan wisata, serta pemanfaatan media digital. Di sinilah *capacity building* (penguatan kapasitas) memegang peran kunci yang krusial, intervensi ini hadir sebagai instrumen strategis untuk mengoneksikan investasi finansial kolektif warga dengan sistem tata kelola destinasi yang profesional. Tanpa adanya penguatan kapasitas, investasi material yang telah dikeluarkan warga berisiko tidak terarah dan kehilangan momentum keberlanjutannya. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan pengelola wisata, terutama Pokdarwis, menjadi sangat

penting untuk mendorong koordinasi, akuntabilitas keuangan, dan efektivitas pengelolaan secara lebih terstruktur (Moscardo, 2008). Melalui SDM yang tangguh, pengembangan sarana dan prasarana pendukung wisata yang saat ini masih membutuhkan perhatian lebih lanjut dapat dieksekusi dengan baik guna meningkatkan kenyamanan pengunjung. Selain itu, pemanfaatan media digital sebagai sarana promosi juga memiliki peluang besar untuk dikembangkan secara profesional, mengingat peran strategis teknologi dalam memperluas jangkauan pasar wisata dan meningkatkan daya saing destinasi (Xiang & Gretzel, 2010). Penguatan kapasitas ini pada akhirnya juga akan bermuara pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, mengingat keberadaan sumber mata air sebagai daya tarik utama wisata sangat bergantung pada kelestarian lingkungan yang dikelola secara profesional.

Berdasarkan kondisi objektif tersebut, urgensi penanganan Wisata Sumber Nyamplung mutlak memerlukan pendekatan yang komprehensif dan partisipatif. Dalam kaitan ini, integrasi *capacity building* berbasis *community-based tourism* (CBT) menjadi sangat relevan karena mampu mengurai kelemahan manajemen melalui peningkatan keterampilan individu, penguatan tata pamong, serta perumusan sistem pengelolaan yang berkelanjutan. Sebagai wujud implementasi dari pendekatan tersebut, program pengabdian kepada masyarakat di Dusun Tembong ini dirancang secara sistematis melalui serangkaian tahapan yang meliputi observasi, sosialisasi, pelatihan, pendampingan intensif, serta evaluasi dampak. Eksekusi program dijalankan dengan membangun sinergi lintas sektoral yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan kunci, mulai dari warga, elemen pemuda, perangkat desa, hingga optimalisasi peran Pokdarwis sebagai motor penggerak utama di lapangan. Melalui konsolidasi kolektif ini, program tidak hanya berfokus pada pembenahan internal tata kelola organisasi, melainkan juga diarahkan pada penguatan identitas luar destinasi melalui pembangunan citra (*branding*) wisata serta perluasan jangkauan pasar berbasis platform digital.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kapasitas masyarakat, memperkuat kelembagaan lokal, serta mendukung pengembangan desa wisata yang berkelanjutan. Oleh karena itu, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengembangkan Desa Wisata Sumber Nyamplung melalui pendekatan *capacity building* berbasis *community-based tourism* guna mendorong peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

METODE PENGABDIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Dusun Tembong, Desa Plintahan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan mulai tanggal 09 Juli 2025 s/d 09 Agustus 2025, dengan menggunakan pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD), yaitu pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada pemanfaatan aset dan potensi lokal sebagai dasar pengembangan (Rout, 2017). Pendekatan ini menekankan bahwa setiap komunitas pada dasarnya memiliki sumber daya yang dapat dikembangkan, baik berupa sumber daya alam, sosial, maupun kelembagaan, sehingga pembangunan tidak bertumpu pada kekurangan (*deficit-based*), melainkan pada kekuatan yang dimiliki komunitas. Dalam konteks ini, potensi sumber mata air, kekuatan sosial masyarakat, serta keberadaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) menjadi aset utama yang dioptimalkan dalam pengembangan desa wisata. Pendekatan ABCD dipilih karena dinilai relevan dengan karakteristik masyarakat desa yang memiliki modal sosial kuat dan potensi lokal yang belum sepenuhnya terkelola secara optimal. Tahapan pelaksanaan

kegiatan mengacu pada prinsip-prinsip ABCD yang diintegrasikan dengan metode partisipatif, di mana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam seluruh proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program (Chambers, 1994).

Secara teknis, pemetaan dan penggalian kekuatan komunitas di lapangan dijalankan melalui instrumen *Asset Mapping* (Pemetaan Aset) untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan modal fisik serta modal sosial yang terbengkalai. Selanjutnya, instrumen *Appreciative Inquiry* (Wawancara Apresiatif) diterapkan secara mendalam melalui forum diskusi terarah untuk mengeksplorasi keberhasilan masa lalu warga, yang kemudian diintegrasikan ke dalam lima tahapan siklus ABCD, yaitu: 1) *Define* (menetapkan fokus gerakan); 2) *Discover* (menemukan aset inti); 3) *Dream* (merumuskan masa depan desa wisata bersama warga); 4) *Design* (menyusun rencana aksi kolaboratif); dan 5) *Destiny* (melaksanakan aksi nyata operasionalisasi dan keberlanjutan). Tahapan kegiatan meliputi:

1. Identifikasi dan Pemetaan Aset

Tahap awal dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara dengan masyarakat, perangkat desa, serta pengelola wisata. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai potensi yang dimiliki, seperti sumber daya alam (sumber mata air), potensi sosial (gotong royong, keterlibatan pemuda), serta aset kelembagaan (Pokdarwis). Selain itu, dilakukan juga pemetaan kondisi eksisting pengelolaan wisata sebagai dasar penyusunan program pengabdian. Dalam pendekatan ABCD, tahap ini menjadi penting karena berfungsi untuk menggali kekuatan internal komunitas sebagai fondasi pengembangan, bukan sekadar mengidentifikasi permasalahan (Al-Kautsari, 2019). Dengan demikian, proses pemetaan aset tidak hanya menghasilkan data, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat terhadap potensi yang mereka miliki.

2. Perumusan Rencana Bersama

Pada tahap ini dilakukan diskusi partisipatif melalui kegiatan sosialisasi dan *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilaksanakan tanggal 15 Juli 2025 (lihat gambar 1 dan gambar 2). Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesepahaman mengenai arah pengembangan wisata, serta merumuskan rencana kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Kegiatan FGD awal bertempat di Kantor Desa Plintahan, dengan menghadirkan pengurus Pokdarwis, Perwakilan perangkat desa, Tokoh Masyarakat dan Pemuda.

Proses partisipatif ini sejalan dengan prinsip pemberdayaan masyarakat yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif dalam proses perencanaan sebagai bentuk penguatan kapasitas sosial dan demokratisasi pembangunan (Chambers, 1994). Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan juga mendorong terbentuknya rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap program yang akan dijalankan, yang menjadi faktor penting dalam keberlanjutan program.



Gambar 1 dan Gambar 2. FGD Pemetaan Destinasi
Sumber: Dokumentasi Author

3. Implementasi Program

Tahap implementasi dilakukan melalui berbagai kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas dan penguatan pengelolaan wisata, antara lain:

1. Pelatihan Manajemen Wisata dan Tata Kelola Destinasi. Dilaksanakan 03 Agustus 2025 bertempat di Lokasi Destinasi Wisata, mulai pukul 18.30 s/d 22. WIB. Waktu malam hari diambil, dengan pertimbangan aktifitas peserta pada siang hari digunakan untuk bekerja. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas pengelola lokal terkait prinsip-prinsip dasar pengelolaan destinasi wisata berbasis masyarakat. Pelatihan ini menghadirkan Wakil Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kabupaten Pasuruan, Arif Hidayatullah, sebagai narasumber utama, juga praktisi sekaligus fasilitator pemberdayaan wisata desa yang telah berpengalaman mendampingi desa wisata di wilayah Kabupaten Pasuruan dan juga beberapa kota lainnya. Pelatihan difokuskan pada tiga pokok bahasan utama yang relevan dengan kondisi Wisata Sumber Nyamplung, yaitu dasar-dasar manajemen Wisata, tugas dan fungsi POKDARWIS dan Perencanaan dan Pengelollan destinasi
2. Pelatihan Pemanfaatan Media Digital (Digital Marketing). Dilaksanakan tanggal 02 Agustus 2025 oleh Team Pengabdian. Peserta adalah divisi publikasi Pokdarwis. Materi difokuskan pada praktik langsung pembuatan konten kreatif menggunakan aplikasi *smartphone*, optimalisasi algoritma Instagram dan TikTok untuk promosi wisat.
3. Aksi Kolektif dan Penataan Kawasan Wisata: Kegiatan gotong royong pembersihan serta penataan kawasan mata air Sumber Nyamplung yang dilaksanakan Mulai Minggu ke-2, sebanyak 3 sesi (masing-masing berdurasi 3 jam) dengan melibatkan pemuda dan warga lokal setempat.

4. Penguatan Identitas Visual (*Branding*). Proses perancangan hingga pemasangan identitas visual berupa 3 unit plakat penunjuk arah dan papan informasi wisata, yang dikerjakan secara partisipatif.
5. Launching Destinasi Wisata yang merupakan puncak pendampingan, dilaksanakan tanggal 06 Agustus 2025.

Seluruh kegiatan dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *capacity building* yang menekankan peningkatan kemampuan individu dan kolektif dalam mengelola sumber daya secara mandiri dan berkelanjutan (halisa & Halisa, 2022). Selain itu, integrasi pelatihan dan praktik langsung di lapangan mencerminkan pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*) yang dinilai efektif dalam meningkatkan kompetensi masyarakat.

4. Evaluasi dan Refleksi

Evaluasi dilakukan secara kualitatif melalui observasi, wawancara, serta diskusi dengan peserta kegiatan untuk mengukur tingkat pemahaman, keterampilan, dan partisipasi masyarakat setelah pelaksanaan program. Pendekatan evaluasi ini memungkinkan peneliti untuk memahami perubahan yang terjadi tidak hanya secara teknis, tetapi juga secara sosial dan kultural.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan program pengabdian di Dusun Tembong, Desa Plintahan menunjukkan adanya transformasi yang bersifat multidimensional, mencakup aspek sosial, kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, serta penguatan ekonomi lokal. Transformasi ini tidak berlangsung secara linier, melainkan melalui interaksi antar program yang saling memperkuat dalam kerangka *community-based tourism* (CBT) dan *capacity building*. Untuk memberikan gambaran sistematis, capaian program dirangkum dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Ringkasan Program dan Hasil Kegiatan

No	Program Kegiatan	Output Utama	Dampak Awal
1	Gotong royong dan penataan kawasan	Area wisata lebih bersih dan tertata	Meningkatnya kesadaran lingkungan
2	Pembuatan plakat wisata	Identitas visual destinasi.	Penguatan citra dan daya tarik wisata
3	Pelatihan manajemen wisata dan media sosial	Peningkatan pengetahuan pengelolaan dan terbentuknya akun promosi digital	Meningkatnya kesiapan pengelola dan peningkatan visibilitas wisata
4	Pendampingan Pokdarwis	Penguatan koordinasi organisasi	Kelembagaan lebih terstruktur
5	Launching wisata	Peresmian destinasi sebagai destinasi yang siap dikunjungi oleh publik	Peningkatan eksposur publik melalui publikasi yang lebih luas di media, dokumentasi, dan penyebaran informasi secara sosial dan memperkuat legitimasi sosial bahwa destinasi tersebut telah siap dikelola dan dikembangkan secara berkelanjutan.

Sumber: Olahan Author

1. Transformasi Sosial dan Penguatan Partisipasi Masyarakat

Hasil program menunjukkan bahwa kegiatan berbasis aksi kolektif, seperti gotong royong, berperan penting dalam membangun partisipasi masyarakat (Qusairi et al., 2025). Pada awalnya, kegiatan ini tampak sebagai intervensi fisik berupa pembersihan kawasan wisata, namun dalam praktiknya berfungsi sebagai ruang interaksi sosial yang memperkuat relasi antar warga.



Gambar 3 dan Gambar 4. Gotong Royong Pentaaan Area Wisata

Sumber: Dokumentasi Author

Partisipasi yang terbentuk melalui pengalaman kolektif ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengembangan wisata tidak dapat dibangun secara instan, tetapi memerlukan proses sosial yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa partisipasi dalam *community-based tourism* merupakan hasil dari proses internalisasi nilai dan pengalaman bersama, bukan sekadar mobilisasi (Chamidi et al., 2023).

Lebih lanjut, keterlibatan masyarakat dalam berbagai tahapan program mencerminkan terbentuknya modal sosial (*social capital*) yang menjadi fondasi utama dalam pengelolaan wisata berbasis komunitas (Pedro et al., 2024). menekankan bahwa pemberdayaan dalam pariwisata terjadi ketika masyarakat memiliki kontrol terhadap sumber daya dan merasa memiliki manfaat dari aktivitas tersebut. Dalam konteks ini, rasa memiliki (*sense of belonging*) mulai terlihat sebagai dampak dari keterlibatan aktif masyarakat. Selain itu, kegiatan seperti pembuatan plakat wisata juga berkontribusi dalam memperkuat identitas kolektif masyarakat terhadap destinasi.



Gambar 5 dan Gambar 6. Pemasangan Plakat sebagai Identitas Lokasi Wisata
Sumber: Dokumentasi Author

Identitas ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga berperan dalam membangun legitimasi sosial terhadap keberadaan wisata sebagai bagian dari ruang hidup masyarakat. Dalam konteks ini, kegiatan pemasangan plakat pada lokasi wisata baru menjadi langkah konkret yang memperkuat konstruksi identitas tersebut di ruang fisik. Plakat tidak sekadar berfungsi sebagai penanda administratif, tetapi juga sebagai representasi visual yang menegaskan keberadaan dan pengakuan kolektif terhadap destinasi wisata oleh masyarakat dan pemangku kepentingan. Lebih jauh, keberadaan plakat turut memberikan kepastian spasial bagi pengunjung sekaligus memperkuat citra destinasi sebagai ruang yang telah “diresmikan” dan layak dikunjungi. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat menekankan pentingnya keterlibatan aktif komunitas dalam menciptakan identitas destinasi, memperkuat rasa memiliki (*sense of ownership*), serta membangun legitimasi sosial terhadap ruang wisata yang dikembangkan (Walia, 2020). Dengan demikian, pemasangan plakat dapat dipahami sebagai bagian dari strategi legitimasi yang menghubungkan antara simbol, ruang, dan praktik sosial. Upaya ini juga mempertegas bahwa pengembangan wisata tidak hanya berhenti pada tataran wacana, tetapi telah diwujudkan dalam bentuk konkret yang dapat dikenali, diakses, dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Selain itu pentingnya identitas lokal dan partisipasi masyarakat dalam membangun legitimasi serta keberlanjutan destinasi wisata (Singgalen & Prasadja, 2025).

2. Capacity Building dan Penguatan Kelembagaan Lokal

Pelatihan manajemen wisata dan pendampingan Pokdarwis menunjukkan adanya peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola destinasi wisata secara lebih terstruktur. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga mencakup perubahan cara pandang masyarakat terhadap pengelolaan wisata. Moscardo (2008) menjelaskan bahwa *capacity building* merupakan proses yang mencakup penguatan kemampuan individu dan kolektif dalam merespons perubahan dan mengelola sumber daya secara mandiri (Moscardo, 2008). Dalam konteks ini, pelatihan yang

dilakukan tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk kesadaran baru tentang pentingnya profesionalisme, pelayanan, dan keberlanjutan dalam pengelolaan wisata.

Pelatihan manajemen pengelolaan wisata dilaksanakan di kawasan Wisata Sumber Nyamplung dengan melibatkan kelompok pengelola wisata dan tokoh pemuda setempat. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya revitalisasi destinasi melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia lokal dalam pengelolaan wisata berbasis masyarakat, khususnya untuk meningkatkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar manajemen destinasi yang berkelanjutan. Kegiatan ini menghadirkan Arif Hidayatullah, Wakil Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kabupaten Pasuruan, sebagai narasumber utama. Dengan pengalaman dalam pendampingan desa wisata, beliau memberikan materi berbasis praktik yang disesuaikan dengan kondisi lapangan sehingga mudah diaplikasikan oleh pengelola lokal. Materi pelatihan difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu dasar-dasar manajemen wisata, peran dan fungsi Pokdarwis, serta perencanaan dan pengelolaan destinasi. Ketiga aspek tersebut diarahkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan lokal serta mendorong terciptanya tata kelola wisata yang lebih terarah, partisipatif, dan berkelanjutan.



Gambar 7. Pelatihan Manajemen Wisata

Sumber: Dokumentasi Author

Di sisi lain, pendampingan terhadap Pokdarwis memperlihatkan bahwa penguatan kapasitas individu perlu diimbangi dengan penguatan kelembagaan. Pokdarwis mulai menunjukkan peran yang lebih terstruktur dalam koordinasi dan pengambilan keputusan, yang mengindikasikan adanya proses *institutional strengthening*. Dalam perspektif CBT, kelembagaan lokal berfungsi sebagai *local governance structure* yang memastikan bahwa pengelolaan wisata berjalan secara kolektif dan berkelanjutan (Ahwan, Z. et al., 2026). Tanpa kelembagaan yang kuat, partisipasi masyarakat berpotensi bersifat temporer dan tidak terorganisir (Pratiwi et al., 2024). Oleh karena itu, integrasi antara pelatihan dan pendampingan menjadi kunci dalam membangun sistem pengelolaan wisata yang berkelanjutan.

3. Digitalisasi, Branding, dan Implikasi Ekonomi Lokal

Pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi menunjukkan adanya adaptasi masyarakat terhadap perkembangan teknologi digital. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan visibilitas destinasi, tetapi juga membuka ruang baru bagi masyarakat, khususnya pemuda, untuk berperan aktif dalam pengelolaan wisata. Dalam konteks ini, keterlibatan pemuda dalam pengelolaan media sosial mencerminkan munculnya *digital agency*, yaitu kemampuan komunitas dalam mengontrol representasi dan narasi destinasi di ruang publik. Goodwin dan Santilli (2009) menekankan bahwa akses terhadap pasar merupakan faktor penting dalam keberhasilan CBT, dan media digital menjadi salah satu instrumen yang efektif untuk menjembatani komunitas dengan pasar yang lebih luas (Goodwin & Santilli, 2009).

Selain itu, kegiatan launching wisata menjadi momentum penting dalam memperkuat eksposur publik sekaligus legitimasi sosial terhadap destinasi. Launching tidak hanya berfungsi sebagai seremoni, tetapi juga sebagai strategi komunikasi yang menandai kesiapan destinasi untuk dikembangkan secara lebih luas (Saputra & Pamungkas, 2023). Hal ini juga tercermin dalam kegiatan launching Wisata Desa Sumber Nyamplung yang diselenggarakan secara terencana dengan melibatkan berbagai unsur penting, antara lain Pemerintah Desa, jajaran BPD dan LPMK, organisasi BUMDes, Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS), tokoh masyarakat, kelompok PKK dan Karang Taruna, serta lembaga pendidikan di lingkungan desa.

Pelaksanaan launching Wisata Sumber Nyamplung tidak hanya dimaknai sebagai penutup rangkaian program pengabdian, tetapi sebagai intervensi strategis dalam mengakselerasi transformasi potensi desa menjadi destinasi wisata yang operasional. Keterlibatan multipihak, meliputi Pemerintah Desa Plintahan, BPD dan LPMK, BUMDes, Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS), tokoh masyarakat, PKK, Karang Taruna, serta perwakilan lembaga pendidikan merefleksikan terbentuknya jejaring kolaboratif yang menjadi prasyarat penting dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (Rohmah & Ahwan, 2024). Partisipasi aktor-aktor lokal ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menunjukkan adanya legitimasi sosial dan dukungan kolektif terhadap inisiatif pengembangan wisata desa. Secara konseptual, kegiatan launching diposisikan sebagai strategi komunikasi publik yang berfungsi untuk membangun awareness sekaligus memperkuat citra destinasi. Hal ini tercermin dari desain acara yang, meskipun sederhana, tetap mengandung simbolisme dan pesan strategis, seperti prosesi potong tumpeng sebagai representasi nilai syukur dan kebersamaan, serta penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Desa Plintahan dan Universitas Yudharta Pasuruan sebagai bentuk institusionalisasi komitmen pengembangan berkelanjutan. Dengan demikian, launching tidak hanya menjadi ruang ekspresi budaya lokal, tetapi juga medium formal untuk memperkuat tata kelola kolaboratif.



Gambar 8. Launching Wisata Sumber Nyampung

Sumber: Dokumentasi Author



Gambar 9. Launching Wisata Sumber Nyampung

Sumber: Dokumentasi Author

Lebih lanjut, dimensi promosi dalam kegiatan ini diperkuat melalui pemanfaatan media sosial sebagai kanal diseminasi informasi. Partisipasi aktif para peserta dalam menyebarkan informasi menunjukkan adanya pendekatan berbasis jejaring (*network-based promotion*) yang relatif efektif dalam meningkatkan jangkauan publik tanpa ketergantungan pada media konvensional. Praktik ini sekaligus mengindikasikan pergeseran pola promosi destinasi desa ke arah digitalisasi yang lebih partisipatif. Dari perspektif hasil, launching Wisata Sumber

Nyamplung dapat dipahami sebagai titik transisi dari kondisi “potensi laten” menuju “destinasi aktif”. Artinya, kegiatan ini tidak berhenti pada output administratif seperti pelatihan atau dokumen perencanaan, melainkan menghasilkan outcome konkret berupa aktivasi ruang wisata yang sebelumnya belum termanfaatkan. Dengan demikian, launching berfungsi sebagai katalis yang mempercepat proses operasionalisasi destinasi sekaligus memperkuat posisi wisata desa dalam konteks pembangunan ekonomi lokal berbasis potensi dan kearifan setempat.

Dari sisi ekonomi, pengembangan Wisata Sumber Nyamplung mulai menunjukkan potensi dalam mendorong diversifikasi sumber pendapatan masyarakat. Aktivitas wisata membuka peluang bagi pengembangan usaha lokal, yang dalam jangka panjang dapat menghasilkan efek berganda (*multiplier effect*) terhadap perekonomian masyarakat (Goodwin & Santilli, 2009). Dampak ekonomi tersebut mencakup tiga tingkat. Pertama, dampak langsung berupa pendapatan yang diterima pelaku usaha lokal dari pengeluaran wisatawan. Kedua, dampak tidak langsung yang muncul dari aktivitas pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan operasional, termasuk dari sektor lain seperti pertanian dan perdagangan. Ketiga, dampak lanjutan berkaitan dengan penyediaan lapangan kerja dan peningkatan aktivitas ekonomi yang lebih luas. Namun demikian, temuan ini juga menunjukkan bahwa potensi ekonomi tersebut masih memerlukan penguatan lebih lanjut, terutama dalam hal inovasi produk, konsistensi pengelolaan, dan penguatan jejaring pemasaran. Oleh karena itu, keberlanjutan dampak ekonomi sangat bergantung pada integrasi antara *capacity building*, penguatan kelembagaan, dan partisipasi masyarakat.

KESIMPULAN

Program pengabdian kepada masyarakat melalui pengembangan Wisata Sumber Nyamplung di Dusun Tembong, Desa Plintahan menunjukkan bahwa pendekatan *capacity building* berbasis *community-based tourism* mampu mendorong transformasi yang signifikan pada aspek sosial, kapasitas sumber daya manusia, dan kelembagaan lokal. Temuan utama menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat yang dibangun melalui aktivitas kolektif seperti gotong royong menjadi fondasi awal dalam menciptakan rasa memiliki dan memperkuat modal sosial. Di sisi lain, pelatihan dan pendampingan yang dilakukan tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga mengubah cara pandang masyarakat menjadi lebih adaptif, profesional, dan berorientasi pada keberlanjutan dalam pengelolaan wisata.

Selain itu, penguatan kelembagaan melalui Pokdarwis berperan penting dalam memastikan keberlanjutan program, karena mampu mengorganisir partisipasi masyarakat ke dalam sistem pengelolaan yang lebih terstruktur (Sakirin et al., 2021). Pemanfaatan media sosial sebagai strategi promosi juga menunjukkan adanya kemampuan adaptasi masyarakat terhadap perkembangan teknologi, yang berimplikasi pada peningkatan visibilitas destinasi dan peluang pengembangan ekonomi lokal. Secara keseluruhan, integrasi antara partisipasi masyarakat, penguatan kapasitas, dan kelembagaan lokal menjadi kunci dalam pengembangan desa wisata yang berkelanjutan. Kontribusi pengabdian ini terletak pada penguatan pemahaman bahwa pengembangan desa wisata tidak cukup hanya berfokus pada potensi fisik, tetapi harus didukung oleh proses sosial yang mampu membangun partisipasi, kapasitas, dan kelembagaan secara simultan. Model integratif antara *capacity building* dan *community-based tourism* yang diterapkan dalam studi ini dapat menjadi rujukan konseptual dan praktis dalam pengembangan desa wisata berbasis masyarakat di konteks yang serupa.

Adapun saran untuk pengabdian selanjutnya adalah perlunya pengkajian lebih lanjut mengenai dampak ekonomi secara kuantitatif, termasuk pengukuran kontribusi wisata terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan efek berganda (*multiplier effect*) yang dihasilkan. Selain itu, pengabdian lanjutan juga dapat mengeksplorasi strategi penguatan inovasi produk wisata dan digitalisasi yang lebih berkelanjutan, serta memperluas analisis pada aspek kebijakan dan jejaring kemitraan dalam mendukung pengembangan desa wisata secara jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahwan, Z., Siti, M., & Marzuki, E. M. (2026). Going beyond formal governance: Indigenous social structure as a mediator of Pentahelix collaboration in the development of community-based cultural tourism, typical of the Indonesian Tengger Tribe: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17459435.2026.2634655>
- Al-Kautsari, M. M. (2019). Asset-Based Community Development: Strategi Pengembangan Masyarakat. *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 4(2), 259–278. <https://doi.org/10.24235/empower.v4i2.4572>
- Aref, F. (2011). Barriers to community capacity building for tourism development in communities in Shiraz, Iran. *Journal of Sustainable Tourism*, 19(3), 347–359. <https://doi.org/10.1080/09669582.2010.517314>
- Chambers, R. (1994). Participatory rural appraisal (PRA): Analysis of experience. *World Development*, 22(9), 1253–1268. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(94\)90003-5](https://doi.org/10.1016/0305-750X(94)90003-5)
- Chamidi, A. S., Kurniawan, B., & Soleh, A. N. (2023). Pendekatan ABCD dan Manajemen. Yayasan Wiyata Bastari Samasta.
- Goodwin, H., & Santilli, R. (2009). Community-Based Tourism: A success?
- halisa, N., & Halisa, N. (2022). Metode Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat (R3mpq_v1). OSF Preprints. <https://doi.org/10.31219/osf.io/r3mpq>
- Jones, S. (2005). Community-Based Ecotourism: The Significance of Social Capital. *Annals of Tourism Research*, 32(2), 303–324. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2004.06.007>
- Lane, B., Kastenholz, E., & Carneiro, M. J. (2022). Rural Tourism and Sustainability: A Special Issue, Review and Update for the Opening Years of the Twenty-First Century. *Sustainability*, 14(10), 6070. <https://doi.org/10.3390/su14106070>
- Moscardo, G. (2008). Community capacity building: An emerging challenge for tourism development. In *Building community capacity for tourism development* (pp. 1–15). <https://doi.org/10.1079/9781845934477.0001>
- Pedro, E. L., Bagus, N., & Adiwidjaja, I. (2024). Analisis Penerapan Modal Sosial Ekonomi Masyarakat Terhadap Pengembangan Desa Wisata Sidomulyo Kota Batu. *Indonesian Social Science Review*, 2(2), 78–88. <https://doi.org/10.61105/issr.v2i2.90>
- Pratiwi, B. P. P., Kartina, A., Hady, F., Alya, G., Tasya, I., Irham, M., Putri, N., Izzuddin, N., Khalilah, N., & Jawda, R. (2024). Community Empowerment And Sustainable Tourism: The Implementation Of Community-Based Tourism Programme In Songkhla City. *Jurnal Layanan Masyarakat*, 8(3), 451. <https://doi.org/10.20473/jlm.v8i3.2024.451-459>

- Qusairi, A., Arsyillah, B. T., Anwar, K., & Yakup, A. (2025). Penggunaan Metode ABCD untuk Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Desa Tandon Sentul. *Filantropis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 89–98. <https://doi.org/10.38073/filantropis.v1i1.3443>
- Riannada, R., & Mardiyah, S. (2021). Peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kencana Dalam Pengembangan Desa Wisata Adat Osing Kemiren. *J+PLUS UNESA*, 10(1), 315–328.
- Rochman, N. (2017). Model Pengembangan Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. *Equilibria Pendidikan: Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi*, 1(1), 59–70. <https://doi.org/10.26877/ep.v1i1.1831>
- Rohmah, S. A., & Ahwan, Z. (2024). Tourism Construction Model: Pengembangan Rintisan Desa Wisata Khas Suku Tengger di Kawasan Hinterland Bromo Pasuruan. *Jurnal Komunikasi Nusantara*, 6(1), 125–135.
- Rout, P. C. (2017). Asset based community development in mountain environs: A strategic application for sustainable community based tourism development in the Jaunsar-Bawar region of Uttarakhand, India. *Tourism and Leisure*, 6.
- Sakirin, S., Bagiastra, I. K., Murianto, M., Idrus, S., & Kurniansah, R. (2021). Peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dalam Pengembangan Potensi Wisata Gunung Sasak Di Desa Kuripan Giri Sasaka. *Journal Of Responsible Tourism*, 1(2), 55–62. <https://doi.org/10.47492/jrt.v1i1.993>
- Saputra, D., & Pamungkas, B. D. (2023). Strategi Pemasaran Pariwisata Dalam Rangka Meningkatkan Daya Tarik Kunjungan Wisatawan Di Kabupaten Sumbawa. *Samalewa: Jurnal Riset & Kajian Manajemen*, 3(1), 21–32. <https://doi.org/10.58406/samalewa.v3i1.1182>
- Scheyvens, R. (1999). Ecotourism and the empowerment of local communities. *Tourism Management*, 20(2), 245–249.
- Singgalen, Y. A., & Prasadja, H. (2025). *Pariwisata Berbasis Komunitas*. Penerbit Widina.
- Walia, S. K. (Ed.). (2020). *The Routledge Handbook of Community Based Tourism Management: Concepts, Issues & Implications*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429274664>
- Xiang, Z., & Gretzel, U. (2010). Role of social media in online travel information search. *Tourism Management*, 31(2), 179–188. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2009.02.016>